

ABSTRAK

Studi ini membahas pada tahun 2024 sejumlah 88 penyandang disabilitas di Kota Kediri belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Kota Kediri. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya peminatan untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik khususnya terhadap kaum penyandang disabilitas di Kota Kediri. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kediri seharusnya lebih diperhatikan pelayanan publik kaum disabilitas ini terutama terhadap pelayanan publik terhadap administrasi kependudukan E-KTP tanpa adanya diskriminatif karena kaum penyandang disabilitas ini juga memiliki hak yang sama sebagai Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Rumusan masalah ini yaitu Bagaimana penerapan hak pelayanan publik terhadap administrasi kependudukan E-KTP bagi penyandang disabilitas di Kota Kediri? dan Apa saja kendala dalam penerapan hak pelayanan publik terhadap administrasi kependudukan E-KTP oleh Dispendukcapil Kota Kediri bagi penyandang disabilitas di Kota Kediri?. Tujuan dalam penelitian ini, untuk untuk menganalisis penerapan tentang hak pelayanan publik terhadap administrasi kependudukan E-KTP bagi penyandang disabilitas di Kota Kediri dengan berpedoman Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan untuk menganalisis kendala penerapan dalam memenuhi hak pelayanan publik terhadap administrasi kependudukan E-KTP oleh Dispendukcapil Kota Kediri bagi warga penyandang disabilitas di Kota Kediri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.

Kata Kunci: Disabilitas. Pelayanan publik, Kartu Tanda Penduduk.

ABSTRACT

This study discusses that in 2024 a number of 88 people with disabilities in the City of Kediri will not yet have an Electronic Resident Identity Card (E-KTP) for the City of Kediri. This shows that there is minimal interest in having an Electronic Identity Card, especially for people with disabilities in Kediri City. The Department of Population and Civil Registration in the City of Kediri should pay more attention to public services for disabled people, especially to public services for E-KTP population administration without discrimination because people with disabilities also have the same rights as Indonesian citizens in accordance with applicable regulations. An Electronic Resident Identity Card is a population document that contains a security/control system both in terms of administration and information technology based on a national population database. The formulation of this problem is: How do public service rights apply to the E-KTP population administration for people with disabilities in Kediri City? and What are the obstacles in implementing the right to public service in the administration of E-KTP population by the Kediri City Population and Civil Registration Department for people with disabilities in Kediri City? The aim of this research is to analyze the application of the right to public service to the E-KTP population administration for people with disabilities in Kediri City, guided by Article 19 of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and to analyze the obstacles to implementation in fulfilling the right to public service for E-KTP population administration by the Kediri City Population and Civil Registration Department for residents with disabilities in Kediri City. The method used in this research is empirical which was carried out at the Kediri City Population and Civil Registration Service.

Keywords: *Disability. Public services. Electronic identity card.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Penelitian Terdahulu	9
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Jenis Penelitian	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian	14
1.6.3 Lokasi Penelitian	14
1.6.4 Sumber Data Penelitian	15
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	16
1.6.6 Analisis Data	18
1.7 Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
2.1. Tinjauan Umum Pelayanan Publik	21
2.1.1 Pengertian Pelayanan Publik	21
2.1.2 Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik	22

2.1.3 Asas-Asas Pelayanan Publik	24
2.1.4 Unsur-Unsur Pelayanan Publik.....	25
2.1.5 Standar Pelayanan Publik	26
2.1.6 Pola Pelayanan Publik	29
2.1.7 Bentuk-Bentuk Pelayanan Publik	29
2.2. Tinjauan Umum Administrasi Kependudukan.....	30
2.2.1 Pengertian Administrasi Kependudukan	30
2.2.2 Fungsi Administrasi Kependudukan	32
2.2.3 Tujuan Administrasi Kependudukan.....	32
2.2.4 Bentuk Administrasi Kependudukan	33
2.2.5 Manfaat Tertib Administrasi Kependudukan	34
2.2.6 Ruang Lingkup Administrasi Kependudukan.....	36
2.3. Tinjauan Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	37
2.3.1 Pengertian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	37
2.3.2 Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil....	39
2.3.3 Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..	41
2.4. Tinjauan Umum Penyandang Disabilitas.....	42
2.4.1 Pengertian Penyandang Disabilitas	42
2.4.2 Macam-Macam Disabilitas.....	44
2.4.3 Dampak Psikososial Penyandang Disabilitas.....	46
2.4.4 Hak-Hak Penyandang Disabilitas	47
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	49
3.1 Penerapan Hak Pelayanan Publik terhadap Administrasi Kependudukan E-KTP bagi Penyandang Disabilitas Kota Kediri	49
3.2 Kendala dalam Penerapan Hak Pelayanan Publik terhadap Administrasi Kependudukan E-KTP oleh Dispendukcapil Kota Kediri bagi Penyandang Disabilitas di Kota Kediri	60
BAB IV PENUTUP	69

4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80